KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Atasi krisis energi, saran DPR, alihkan subsidi BBM ke transportasi publik
Tanggal : Sabtu, 25 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Atasi Krisis Energi

Saran DPR, Alihkan Subsidi BBM Ke Transportasi Publik

DPR mengapresiasi respons cepat Pemerintah dalam menghadapi krisis energi global dengan kebijakan seperti *Work From Home* (WFH) setiap Jumat. Agar penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) lebih optimal, DPR memberi saran ke Pemerintah untuk mengalihkan subsidi energi ke investasi transportasi publik.


FOTO : IG PRIBADI

Irine Yusiana

ANGGOTA Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, subsidi BBM kendaraan pribadi harus segera direorientasi secara bertahap untuk mendukung operasional angkutan umum. "Langkah ini agar penggunaan energi lebih efisien dan tepat sasaran," ucapnya, Jumat (24/4/2026).

Investasi pada transportasi publik, lanjutnya, merupakan langkah ekonomi strategis guna menghasilkan penghematan energi massal. Kebijakan itu juga mampu menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mengurangi kemacetan parah. Masyarakat berpenghasilan bawah merupakan pengguna utama moda ini sehingga pemberian subsidi akan terasa jauh lebih adil.

Komisi V DPR mendorong menjadikan krisis energi saat ini sebagai titik balik perbaikan sistem transportasi nasional. Akses layanan pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan bagi warga tidak boleh terhambat akibat pembatasan mobilitas. "Sistem Indonesia harus diarahkan agar lebih tangguh, berkeadilan, juga efisien dalam jangka panjang," ucapnya.

Anggota Komisi XII DPR Ateng Sutisna menambahkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi perlu dibarengi dengan percepatan transportasi publik. Fasilitas transportasi publik harus aman, nyaman, murah, serta menjangkau pusat aktivitas ekonomi. Pembangunan sistem yang terintegrasi sangat mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar meski harga minyak dunia bergejolak.

Transportasi publik yang baik, menurut Ateng, akan jadi solusi nyata mengatasi ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan BBM. Warga memiliki pilihan mobilitas murah sehingga lebih tahan menghadapi fluktuasi harga energi global. Itu juga otomatis mengurangi beban ekonomi rumah tangga karena efisiensi penggunaan bahan bakar dapat tercapai maksimal.

Saat ini, kontribusi angkutan umum terhadap mobilitas di kota besar Indonesia memang masih sangat terbatas. Data menunjukkan, pangsa penggunaan transportasi publik masih di bawah 30 persen pada beberapa wilayah. "Angka itu jauh tertinggal dibandingkan kota maju dunia yang mampu mencapai lebih dari 60 persen," terangnya.

Untuk itu, dia mendorong penguatan pola konsumsi BBM yang lebih efisien melalui edukasi bijak kepada seluruh masyarakat. Penyediaan alternatif terjangkau juga diperlukan guna menjaga stabilitas pengeluaran rumah tangga. Kecerdasan menggunakan bahan bakar harus dibangun agar publik tidak terlalu rentan terhadap perubahan harga yang mendadak.

Dia juga mendorong Pemerintah memperkuat kebijakan energi secara bertahap melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri Indonesia. Diversifikasi sumber daya serta pengembangan biodiesel B35 harus segera dipercepat pelaksanaannya. Pemanfaatan energi baru terbarukan merupakan langkah strategis guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah dari luar.

Indonesia, lanjutnya, tidak boleh terus terjebak dalam pola kebijakan jangka pendek saat harga minyak bergejolak. Arah kebijakan negara harus mampu menjaga keseimbangan antara nilai keekonomian dan perlindungan bagi masyarakat. "Pengambilan keputusan yang tepat akan menjamin stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi global sulit," tegasnya.

Langkah Pemerintah pun sejalan dengan usulan ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, Pemerintah berkomitmen mempercepat perbaikan kualitas transportasi publik. Langkah itu dibarengi upaya mendorong perubahan perilaku masyarakat serta pejabat negara dalam beraktivitas. Harapannya, semua pihak mulai beralih menggunakan transportasi massal demi merespons ancaman krisis energi global saat ini.

Sebagai bagian dari efisiensi, Pemerintah berupaya mengurangi penggunaan kendaraan dinas di kalangan pejabat. Penggunaan energi fosil akan dialihkan secara bertahap menuju energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. "Pengurangan kendaraan berbahan bakar fosil juga telah dari lingkungan Pemerintah untuk memberi contoh nyata kepada seluruh rakyat," terangnya.

Pemerintah, kata dia, juga terus mendorong pengembangan kendaraan berbasis listrik sebagai bagian utama program transisi energi. Presiden Prabowo Subianto juga diketahui telah meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah. Langkah konkret itu untuk memulai penggunaan energi baru terbarukan secara lebih luas.

Semua pihak, lanjut Prasetyo, harus bekerja keras mengubah budaya kerja dengan segera beralih ke sumber daya baru. Penggunaan energi berbasis fosil harus diganti menjadi energi baru terbarukan, salah satunya melalui moda listrik. "Transformasi ini merupakan solusi tepat menghadapi tantangan krisis energi global," tandasnya. ■ PYB